

**DIGITAL PRESENCE DAN ANCAMAN SOFT POWER:
BAGAIMANA DESAIN PENDIDIKAN
KEBANGSAAN MENGHADAPI DISTORSI
“PASAR KEBENARAN” MEDIA SOSIAL ?**

Oleh: Karim Suryadi¹
Universitas Pendidikan Indonesia
karimsuryadi@upi.edu

ABSTRACT

Digital presence can be a chance for enhanced cognitive power and empowered citizen as excellent nucleus of 4.0 industrial revolution spread. But it can also create a soft power threat – a treat that attacks believe and thinking systems. Education is needed to form media intelligence so that digital natives will be selective in using it. Status as digital natives are natural, but media intelligence and civic commitments are behaviors that can be learnt. Substantively, nationality education should be based on the nature of the threat and the need to cope with it. Meanwhile methodically, nationality education should be in line with subject characteristics, especially those who are born and grown up in a digital media environment (digital native). Therefore, characteristics of nationality education is adaptive towards technology advancement and socially beneficial.

Keywords: *digital native, digital presence, social media and truth market*

ABSTRAK

Kehadiran digital (*digital presence*) bisa menjadi peluang meluasnya *enhanced cognitive power* dan *empowered citizen* sebagai *nucleus*

¹ Karim Suryadi, Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, Ketua Dewan Guru Besar UPI (2019-2021), dan kolumnis politik di www.pikiran-rakyat.com.

keunggulan revolusi industri 4.0, namun bisa juga menghadirkan ancaman *soft power*, berupa ancaman yang menyerang sistem berpikir dan keyakinan. Diperlukan pendidikan untuk membentuk kecerdasan bermedia sehingga *digital natives* selektif dalam memanfaatkannya. Status sebagai *digital natives* bersifat alamiah, namun kecerdasan bermedia dan komitmen kewargaan merupakan perilaku yang dipelajari. Secara substantif pendidikan kebangsaan harus bertolak dari hakikat ancaman dan kebutuhan penanggulangannya. Sedangkan secara metodologis, pendidikan kebangsaan harus sesuai dengan karakter subjek, utamanya mereka yang lahir dan besar dalam lingkungan media digital (*digital natives*). Dengan begitu, karakteristik pendidikan kebangsaan adalah adaptif terhadap perkembangan teknologi dan bermanfaat secara sosial.

Kata Kunci: *digital natives*, kehadiran digital, media sosial, pasar kebenaran.

A. PENDAHULUAN

Pada banyak negara, ideologi tidak lagi jadi *vocal concern*. Terminologi ini telah terdesak isu ekonomi, lingkungan, bahkan hak asasi manusia. Namun tidak ada yang menyangsikan, komitmen kebangsaan sebagai *building block of nation*, kian dibutuhkan sebuah bangsa di tengah “perang informasi” yang dapat mengikisnya.

Kehadiran internet yang memberi keleluasaan tanpa batas, kenyamanan, dan kesetaraan menjadi pendorong penting tumbuhnya deliberative democracy, namun pada saat yang sama internet pun dapat menghadirkan “pasar kebenaran” yang sulit dikontrol. Perluasan penetrasi internet memberi warga tenaga untuk bersuara, memunculkan komunitas yang melayani diri sendiri, dan menantang individu untuk menafsir ulang tentang makna hidup dan kehidupannya.

Revolusi industri 4.0 yang antara lain ditandai kehadiran digital (*digital presence*) telah nyata dalam perilaku sebagian warga. Meskipun 84% responden percaya bahwa *tipping points* kehadiran digital baru terjadi pada 2025 (Schwab, 2017), namun sebagian ciri-cirinya, seperti

penggunaan email, *web* pribadi, dan media sosial, telah lekat dengan kehidupan sebagian orang.

Bagi mereka yang lahir ketika media digital sudah mendominasi (*digital natives*), menggunakan perangkat digital dan platform *online* bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja atau menyeimbangkan hidup, melainkan telah menjadi kehidupan kedua (Espinoza & Mick, 2016). Tidak heran pengguna platform media sosial, seperti *facebook* yang mencapai 1,4 milyar telah melebihi jumlah penduduk China, pengguna *twitter* yang berjumlah 646 juta telah melampaui jumlah penduduk Amerika Serikat, dan pengguna *instagram* mencapai 152 juta orang (Schwab, 2017).

Melalui platform media sosial, orang bukan hanya bertukar pesan, atau berbagi informasi, melainkan mendeskripsikan dan membentuk citra dirinya. Kuatnya intensitas pemanfaatan media sosial, platform ini telah mendefinisikan ulang individu dan keluarga (Schwab, 2017).

Jumlah pengguna internet di Indonesia terus bertambah. Dengan mengutip hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Mauludi (2018) mencatat penetrasi internet di Indonesia hingga 2017 mencapai 143,26 juta orang.

Sayangnya kebanyakan pengguna internet tidak kritis dalam menilai kebenarannya. Hasil penelitian CIGI-Ipsos 2016 (Mauludi, 2018) pada pengguna internet di 24 negara (termasuk Indonesia) menunjukkan 65% pengguna memercayai begitu saja apa pun yang tersaji atau yang bisa dilacak melalui internet.

Kondisi ini menjadikan kehadiran internet seperti pedang bermata dua, dampak positif sama kuatnya dengan dampak negatifnya. Padahal, meski mampu menyajikan kenyamanan, keleluasaan, dan kesederajatan, kondisi yang tersaji dalam jejaring internet (termasuk media sosial) tidak seperti “makanan cepat saji” yang “tinggal lep” ditelan.

Kondisi ini menjadi latar belakang mengapa tulisan ini memfokuskan kepada kehadiran digital (*digital presence*) dan ancaman *soft power*, berupa penetrasi kekuatan persuasi budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri (Nye, 2011) melalui pesan (*message*) media sosial yang dilahap

audiens.

Meta riset akan dilakukan terhadap beberapa artikel yang mengiris-tipis fenomena *post truth* melalui media sosial dari perspektif pendidikan kebangsaan dan demokrasi. Uraian berikut tidak dimaksudkan untuk merumuskan strategi bertahan tanpa media, tidak juga mengungkit perang ideologi yang sudah mati suri, namun lebih kepada pencarian solusi bagaimana memanfaatkan media secara sehat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Digital Presence, Bukan Panacea

The World Economic Forum telah mengidentifikasi 23 gelombang besar dampak revolusi industri bagi kehidupan sosial, mulai dari pil cerdas (*smart pill*) yang tertanam di dalam tubuh hingga kecerdasan buatan dalam bidang teknologi syaraf (Schwab, 2017), namun dalam tulisan ini yang relevan dibahas adalah peluang revolusi industri bagi penguatan komunitas dan munculnya warga negara yang terberdayakan (*empowered citizen*).

Salah satu efek digitalisasi bagi masyarakat adalah munculnya komunitas yang “berpusat pada diri sendiri”, sebagai bentuk individualisasi sekaligus bentuk baru keterlibatan warga negara dan komunitas (Schwab, 2017). Proses ini berakar pada efek teknologi digital dalam mendorong individu untuk mendefinisikan ulang identitas diri dan keluarganya di satu sisi, dan keterbukaan, keleluasaan, dan kesederajatan dalam mengelola pesan. Mereka menjadi warga yang terberdayakan dan memiliki bentuk-bentuk baru keterlibatan sosial.

Melebihi perannya sebagai sumber informasi, teknologi digital menjadi corong bagi individu untuk bersuara, jembatan untuk berjejaring global dan saluran berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan eksekusi kebijakan. Keleluasaan, kenyamanan, dan kesetaraan yang disuguhkan internet misalnya, membuat “orang-orang” pinggiran berdaya dan bersuara lantang sama seperti *the ruling class*.

Namun berkembangnya teknologi digital tidak menjamin demokrasi berjalan. Ada kasus dimana revolusi industri 4.0 dimanfaatkan kelompok

berkuasa untuk membuat kelompok lainnya tak berdaya. Laporan risiko Global Forum 2016 menggambarkan fenomena “warga negara yg tidak berdaya“, dimana individu dan masyarakat secara bersamaan diberdayakan dan diabaikan lewat pemanfaatan teknologi oleh pemerintah, perusahaan, dan kelompok kepentingan (Schwab, 2017).

Fenomena pengabaian warga seperti dikutip Laporan di atas menunjukkan bahwa kehadiran digital bukan *panacea* (obat mujarab). Kehadiran digital membuka peluang besar, sekaligus memberi tantangan yang signifikan.

Masalah mendasar sebenarnya adalah ketimpangan ontologis yang muncul akibat pemisahan mereka yang beradaptasi dengan perubahan teknologi dari mereka yang menolak, sekaligus menciptakan orang kaya baru dan mereka yang merana karena tereksplorasi. Ketimpangan ini akan diperburuk oleh kesenjangan antara mereka yang sangat bergantung kepada, dan hidup dengan, media digital, yakni mereka yang dikenal sebagai *digital natives* (Premsky, 2008, dalam Thompson, P., 2013), dengan mereka yang hanya mencurahkan sebagian waktunya untuk bekerja memanfaatkan teknologi digital.

Betapa pun aktivitas memanfaatkan media terhadap kepribadian *digital natives*, atau ada juga yang menyebut sebagai warga negara digital (*digital citizens*), belum terukur secara faktual namun karakter mereka yang disebut terakhir berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka yang tergolong *digital citizens* (Wilkweson et. All., 2018) memiliki perspektif berbeda tentang tugas, dorongan, dan cara pandang tentang kerja dan hubungan mereka dengan perusahaannya.

Dikaji dari teori belajar sosial (Bandura, 1963), perilaku yang dimunculkan *digital natives* adalah “buah” yang mereka dapatkan dari pergaulannya dengan media digital. Kehadiran digital bisa memperkuat terjadinya *enhanced cognitive power* sebagai nucleus keunggulan revolusi industri 4.0 (Schwab, 2017), namun bisa juga menularkan *soft power* berupa ancaman yang menyerang sistem berpikir dan keyakinan. Itulah sebabnya, selektivitas dalam memanfaatkan media digital amat diperlukan, karena maslahat dan mudharatnya akan ditentukan oleh motif dan cara penggunaannya.

2. Media Sosial dan “Pasar Kebenaran”

Politik pasca-kebenaran (*post-truth*) didefinisikan secara beragam tetapi fokus pada ‘politik’, bukan pada ‘kebijakan’ konkret, juga ketidakpercayaan terhadap ‘pakar’ yang berwenang (Hopkin & Rosamond, 2017). Hal ini menegaskan, pada era *post-truth* kebenaran “dikendalikan” oleh mereka yang memiliki kekuasaan (politik, ekonomi, atau sumber lain), dan meruntuhkan wibawa otoritas dan ilmuwan.

Peristiwa politik dari siklus pemilu telah memicu diskusi berita palsu, atau ‘fakta alternatif’. Presiden Thomas Jefferson memiliki keyakinan kuat tentang pasca-kebenaran pada zamannya: “Sekarang tidak ada yang bisa dipercaya, yang terlihat pada koran. Kebenaran itu sendiri mencurigakan ketika dimasukkan ke dalam kendaraan yang tercemar.” (Rowe & Alexander, 2017).

Kebodohan yang meluas, terbuka, tidak ada rasa maaf, bahkan yang berhasil, didukung oleh pihak yang memiliki kekuatan adalah beberapa fenomena khas era pasca-kebenaran. Hal-hal tadi bisa menyangkut masalah besar seperti kebijakan yang menyangkut masyarakat, tetapi juga hal kecil seperti hujan ketika pelantikan Trump. (Lynch, 2017).

Resiko politik pasca-kebenaran (*post-truth*) bukan hanya mengancam stabilitas keamanan, tetapi juga mendegradasi makna politik dan demokrasi itu sendiri. Di dalam berbagai literatur ditegaskan bahwa *post-truth* hanya melahirkan *postpolitics* dan *postdemocracy* (Harsin, 2015). Dalam situasi seperti ini, partisipasi budaya dan pseudopolitik kemungkinan muncul, namun masalah, wacana, dan agensi untuk perubahan sosiopolitik tetap terkendala.

Ketika berita di media sosial telah menggantikan berita di media *mainstream* dan mengubah geografi berita (dimana berita tidak lagi dikirim pagi atau sore hari), norma yang mengatur tertib sosial pun mulai bergeser (Harsin, 2015). Kini para penguasa, seperti juga anggota masyarakat lainnya, mengalami pergeseran disiplin dari “mengikuti aturan” ke arah tatanan yang dikontrol oleh mekanisme disuka (*like*) dan bagikan (*share*). Ujung-ujungnya, viral pun bukan hanya jurus jitu mendulang perhatian, tetapi telah menjadi rezim (Suryadi, 2017).

Sebuah tindakan yang menjadi viral dipandang sebagai bentuk pengakuan atas kebenaran, persetujuan, bahkan dibaca sebagai dukungan atas apa yang menjadi kontennya. Tak heran, alih-alih berusaha mewujudkan perubahan nyata di tengah-tengah warga, banyak penguasa memokuskan perjuangannya mengatur sirkulasi dan konsumsi atas apa yang harus muncul dan didengar. Jika hal terakhir yang terjadi, penguasa akan tampak sibuk melayani warga padahal sejatinya sedang menggembalakan hasrat digitalnya.

Pada era pasca-kebenaran tidak berarti tidak ada kebenaran sama sekali. *Concern*-nya lebih kepada apa yang dianggap sebagai kebenaran, sehingga kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan semakin rendah (Mair, 2017).

Salah satu gejala era *post-truth* adalah merebaknya rumor (Harsin, 2006). Meskipun telah didefinisikan dengan cara yang berbeda, rumor selalu melibatkan pernyataan yang kebenarannya dipertanyakan. Banyak ahli melihat rumor (dan bentuk-bentuk budaya seperti parodi) sebagai peletakan mekanisme produksi kebenaran, sebagai senjata orang lemah (*the weapon of the weak*), namun sekarang rumor dan klaim kebenaran serupa datang dari aktor politik dan ekonomi yang kaya sumber daya.

Di tangan politisi, *post-truth* muncul dalam apa yang diklaim sebagai ekstremisme strategis (Lewandowsky, Ecker, Cook, 2017). Meskipun kebijaksanaan konvensional menyatakan bahwa politisi yang memaksimalkan suara harus melayani kalangan menengah, mengejar pemilih median, ekstremisme dihargai ketika seorang politisi lebih banyak memberi energi kepada para pendukung mereka sendiri.

Salah satu bentuk ekstremisme strategis adalah ketidaksopanan yang ekstrem, sebagaimana dijelaskan Lewandowsky, Ecker, Cook, (2017) bahwa *twitter*, khususnya, mempromosikan wacana publik yang “sederhana, cepat, dan sering merendahkan dan tidak berperikemanusiaan,” dan “menumbuhkan lelucon dan fanatisme, dan berkontribusi terhadap kebodohan dan penghinaan”. Salah satu aspek ketidaksopanan adalah kemarahan yang sangat, ditandai sebagai “wacana politik yang berupaya memprovokasi *netizen* melalui penggunaan generalisasi yang berlebihan, sensasi menyesatkan, atau informasi yang kurang akurat, dan serangan

kebenaran parsial tentang lawan.

Terdapat beberapa sebab *post-truth* merebak melalui media sosial. Kesatu, fleksibilitas dan fraksinasi yang ditawarkan media sosial memungkinkan orang memilih “ruang gema” yang mereka sukai di mana sebagian besar informasi mengkonfirmasi sikap dan bias yang ada (Lewandowsky, Ecker, Cook, 2017). Dalam konteks ini, kebohongan, ekstremisme, bahkan ketidaksopanan dan kekasaran adalah atribut-atribut yang dibutuhkan untuk melengkapi ruang gema.

Kedua, jarak psikologis dan deindividuasi antar-*netizen* berkontribusi pada ketidaksopanan, yang pada gilirannya menumbuhkan polarisasi kelompok. Salah satu bentuk perilaku *online* yang “sangat beracun”, yang dikenal sebagai *trolling*, sering dikaitkan dengan kepribadian negatif: yaitu narsisme, Machiavellianisme, psikopat, dan sadisme. *Trolling* merupakan gabungan antara penipuan, agresi, dan gangguan tidak masuk akal dari wacana sipil *online*. *Trolls* didorong oleh kepemilikan kekuatan negatif dan memengaruhi orang lain dengan menciptakan kekacauan sosial dan interaksi interpersonal negatif (Lewandowsky, Ecker, Cook, 2017).

Ketiga, fenomena *post-truth* muncul karena perubahan psikologi orang, seperti kecemasan yang berlebih membuat orang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan kurang responsif terhadap argumen. Terbentuknya kondisi *backfire*, memberikan orang banyak argumen untuk mengubah cara pandang mereka yang sering salah karena orang tersebut memiliki tujuan untuk menolak bukti. Orang yang cenderung menolak bukti malah memperkuat argumen pribadinya sendiri (Levy, 2017).

Keempat, adanya penurunan jangka panjang modal sosial dan keterlibatan sipil sejak 1960-an atau 1970-an. Modal sosial mengacu kepada faktor-faktor seperti niat baik, empati, kepercayaan di antara orang-orang, kepercayaan pada lembaga-lembaga publik, dan keterlibatan masyarakat. Penurunan modal sosial dapat dilihat dari berkurangnya jumlah rata-rata orang yang dapat dipercaya, yaitu orang-orang yang dengannya kita dapat berbagi rahasia atau privasi tanpa takut terjadinya pengkhianatan. Menurut Lewandowsky, Ecker, Cook (2017), penurunan dalam aspek ini disertai dengan pergeseran nilai-nilai dan tujuan hidup.

Kelima, kemungkinan orang terpapar informasi yang salah juga dipengaruhi oleh perbedaan politik. Terjadi polarisasi di antara poros-poros kekuatan yang ada merembet ke masyarakat yang lebih kongruen. Polarisasi karena politik sama kuat, bahkan lebih besar dibanding polarisasi yang terjadi karena perbedaan ras. Polarisasi juga dipengaruhi oleh penurunan kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan (Lewandowsky, Ecker, Cook, 2017). Ketika polarisasi terjadi, kebenaran tidak didapat dari pertimbangan rasional, melainkan emosional atau bahkan diterima begitu saja.

3. Pendidikan Kebangsaan dan Jebakan “Pasar Kebenaran”

Karakter warga negara digital harus menjadi titik anjak dalam merancang pendidikan kebangsaan. *Framework* ini bertujuan membangun kesadaran dan tahu mana yang benar dan salah dalam menggunakan teknologi *online* (Ribble, 2012). Berdasarkan *framework* ini pendidikan kebangsaan difokuskan kepada pembiasaan sikap toleran dan menghormati orang lain, serta meningkatkan keterlibatan sipil dalam urusan publik (Jones & Mitchell, 2016).

Mewaspada ancaman berwajah lembut (*soft power*) dan membangun “ketahanan informasional” merupakan dua langkah strategis dalam mengarungi era *post-truth*. Sebagai konsekuensinya, deformalisasi pendidikan kebangsaan harus dilakukan, sehingga usaha memupuk komitmen berbangsa tidak hanya dilakukan lewat cara-cara formal seperti latihan militer, seminar kebangsaan, atau kursus bela negara.

Kesatu, faktor-faktor yang memperkokoh dan memperlemah persatuan bangsa bertransformasi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ancaman paling potensial yang dihadapi Indonesia tidak dalam bentuk invasi militer, melainkan kekuatan berwajah lembut (*soft power*), yakni serangan terhadap pikiran warga sebagai instrumen yang merusak relasi kekuasaan dalam sebuah negara.

Ancaman tadi dibungkus lembut berbagai bentuk seni mutakhir, atau informasi media sosial. Terpaan media dengan pesan yang penuh bias dan menyesatkan adalah serangan telak terhadap ketahanan sosial bangsa,

sebuah serangan nir militer yang melumpuhkan komitmen kebangsaan.

Kedua, ancaman yang mengikis rasa berbangsa merasuk seperti virus, merusak imunitas sebagai bangsa, rentan terhadap campur tangan dan rekayasa jahat kekuatan asing. Wujud konkretnya berupa penyangkalan terhadap simbol negara dan menggilai segala hal yang datang dari Barat (*westronomia*). Bila sudah terkena virus ini, elemen bangsa akan menjadi “inang” tempat hinggapnya pikiran jahat yang disuntikan kekuatan asing, atau kekuatan internal yang dikendalikan aktor luar.

Kita bisa belajar dari pola perang yang hampir sama di negara-negara Timur Tengah. Perang bukan melawan tentara asing secara langsung, melainkan perang saudara yang dibantu atau dikendalikan kekuatan asing. Sebenarnya yang bertempur kekuatan asing, namun melalui tangan-tangan kekuatan yang beroperasi di dalam negeri.

Ketiga, kemajuan teknologi informasi memberi jalan bagi terjadinya saling tukar informasi, termasuk mengenai hal-hal paling tabu atau bahkan menyerempet rahasia negara. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi jalan pintas transaksi antarpikiran. Padahal tidak ada informasi yang bebas nilai. Karena itu, informasi bisa menjadi alat pengedali yang potensial.

Keempat, transaksi antarpikiran adalah sesuatu yang laten, dan tidak mudah dipantau. Orang tua, guru, bahkan tentara dan polisi yang bersenjata pun, hanya bisa mengawasi pergerakan fisik orang, namun bukan jalan pikirannya.

Kita tidak akan pernah tahu mana orang yang selektif dalam memilah berita bohong atau berita palsu dan mana yang menjadi penggemar setianya. Karena itu, yang harus dibangun adalah ketahanan informasional, berupa daya kritis dan disiplin konfirmasi dalam setiap usaha pemerolehan informasi. Bila menemukan berita aneh, konfirmasilah. Atau cari sumber berita lain yang bisa menjadi *clearing house*. Ragukan kebenaran berita anonim hingga ia terkonfirmasi kebenarannya.

Kelima, karena spektrum ancaman telah berubah maka deformalisasi pendidikan kebangsaan harus dilakukan. Usaha memupuk rasa berbangsa tidak boleh dimaknai secara sempit, namun bisa dilakukan dalam beragam

bentuk dan konteks. Jangan pernah menganggap usaha memupuk rasa berbangsa hanya bisa dilakukan lewat cara-cara formal seperti latihan militer, seminar kebangsaan, atau kursus bela negara. Bentuk-bentuk tadi tidak haram dilakukan, tetapi bukan satu-satunya.

Keenam, memupuk rasa berbangsa harus menjadi kegiatan yang serba hadir, melalui beragam bentuk aktivitas warga. Para sineas bisa menampilkan merah putih dalam setiap film yang diproduksinya, tidak melulu dalam film perang atau perjuangan yang biasa dilakukan beberapa dekade silam. Para guru bisa memupuk rasa berbangsa lewat aktivitas mengajarnya, baik seni, olah raga, atau lingkungan. Semua guru mata pelajaran bisa mengambil peran ini.

Mahasiswa bisa menyebarkan semangat berbangsa dengan mengajak pengguna media sosial untuk kreatif mencipta pesan, bukan sekedar menjadi *follower* semata. Semakin hanyut pada gagasan orang, semakin tenggelam jati dirinya. Dengan media sosial, semua orang berpotensi jadi pesohor dan tokoh yang pikiran dan gagasannya diikuti banyak orang. Kuncinya, keterlibatan dan tunjukkan otentisitas pemikiran.

B. PENUTUP

Pendidikan kebangsaan dalam menangkal “pasar kebenaran” yang dihadirkan media sosial amat dibutuhkan, karena *digital natives* memanfaatkan media digital tanpa pendidikan media, sehingga tidak sedikit mereka yang memercayai apa pun yang terdedah di dalamnya. Alih-alih menjadi nutrisi bagi transformasi sosial, beragam konten media sosial malah menjadi amunisi untuk memecah belah warga, mengumbar amarah dan ideologi kebencian, serta menista warga lain tanpa ampun.

Pendidikan kebangsaan dirancang bukan untuk membatasi hak untuk tahu dan mengakses media, namun lebih kepada peningkatan selektivitas pengguna. Hal ini penting untuk memastikan pemanfaatan media digital mendatangkan kepuasan dan kegunaan.

Secara substantif pendidikan kebangsaan harus bertolak dari hakikat ancaman dan kebutuhan penanggulangannya. Sedangkan secara

metodologis, pendidikan kebangsaan sesuai dengan karakter subjek, utamanya mereka yang lahir dan besar dalam lingkungan media digital (*digital natives*). Dengan begitu, karakteristik pendidikan kebangsaan adalah adaptif terhadap perkembangan teknologi dan bermanfaat secara sosial.

Kemajuan teknologi informasi harus dimaknai dengan cermat. Kemudahan, keleluasaan, dan kesederajatan yang ditawarkan internet harus diarahkan bagi penguatan demokrasi yang sehat. Untuk itu, harus ada ikhtiar serius menjadikan internet sebagai infrastruktur digital kewargaan.

Infrastruktur digital kewargaan berisi berbagai aktivitas digital yang bertujuan menguatkan komitmen kewargaan, membentuk atribut warga negara yang baik, dan menyalurkan partisipasi warga ke jalan yang benar. Wujudnya bisa dalam bentuk blog, atau platform lain yang memberi ruang bagi kreativitas, keterlibatan, dan tanggung jawab kewargaan.

Infrastruktur ini hanya akan tumbuh di atas selektivitas warga. Karena itu, *media literacy* menjadi kebutuhan dasar yang tidak boleh dilewatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, Albert (1963), *Social Learning and Personality Development*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Birkinshaw, J. (2017) *The Post-Truth World - Why Have We Had Enough Of Experts?* In Forbes website, <https://lhsblogs.typepad.com/files/the-post-truth-world---why-have-we-had-enough-of-experts.pdf>, accessed on february 2019.
- Espinoza, Chip and Mick Ukleja, (2016), *Managing the Millennials: Discover the Core Competencies for Managing Today's Workforce*, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.

- Harsin, J. (2015), *Regimes of Posttruth, Postpolitics, and Attention Economies. Communication, Culture & Critique*, 8(2), 327–333. doi:10.1111/cccr.12097 .
- Hopkin, J., & Rosamond, B. (2017). *Post-truth Politics, Bullshit and Bad Ideas: “Deficit Fetishism” in the UK. New Political Economy*, 1–15. doi:10.1080/13563467.2017.1373757
- Jones, L. M., & Mitchell, K. J. (2016). *Defining and measuring youth digital citizenship. New Media & Society*, 18(9), 2063–2079. doi:10.1177/1461444815577797
- Laybats, C., & Tredinnick, L. (2016). *Post truth, information, and emotion. Business Information Review*, 33(4), 204–206. doi:10.1177/0266382116680741 .
- Levy, N. (2017). *Nudges in a post-truth world. Journal of Medical Ethics*, 43(8), 495–500. doi:10.1136/medethics-2017-104153.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). *Beyond Misinformation: Understanding and Coping with the “Post-Truth” Era. Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353–369. doi:10.1016/j.jarmac.2017.07.008.
- Lynch, M. (2017). *STS, symmetry and post-truth. Social Studies of Science*, 47(4), 593–599. doi:10.1177/0306312717720308.
- Mair, J. (2017). *Post-truth anthropology . Anthropology Today*, 33(3), 3–4. doi:10.1111/1467-8322.12346.
- Maududi, Sahrul (2018), *Awas Hoax: Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Jakarta: Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia.
- Nye, Joseph S., Jr., 2011, *The Future of Power*, New York: United States by PublicAffairs, a member of Perseus Books Group.
- Ribble, M. (2012). *Digital Citizenship for Educational Change. Kappa Delta Pi Record*, 48(4), 148–151. doi:10.1080/00228958.2012.734015
- Rowe, S. B., & Alexander, N. (2017). *On Post-Truth, Fake News, and Trust*.

Nutrition Today, 52(4), 179–182. doi:10.1097/nt.0000000000000229.

Schwab, Klaus, 2017, *The Fourth Industrial Revolution*, World Economic Forum, New York: Currency.

Suryadi, Karim (2017), *Menak Senayan: Arsitektur Komunikasi Politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Jaya.

Thompson, P. (2013). *The digital nativess as learners: Technology use patterns and approaches to learning*. *Computers & Education*, 65, 12–33. doi:10.1016/j.compedu.2012.12.022

Burgess-Wilkerson et al. (2018). *Preparing Millennials as Digital Citizens and Socially and Environmentally Responsible Business Professionals in a Socially Irresponsible Climate* https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3319110

www.mpr.go.id